

TAJUK RENCANA

Genderang Prabowo Menuju 2029

DEMI penghematan, rapimnas itu *dadakan* menjadi kongres luar biasa (KLB). Karena kalau hari ini rapimnas, 3 bulan lagi kongres, beayanya dobel. Dan hasil KLB? Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra 2025 - 2030. Keputusan lain, Prabowo diberi mandat dan diajukan menjadi calon presiden (capres) 2029 mendatang.

Kisah mengubah rapimnas menjadi KLB serta pencapresan tersebut diungkap Presiden Prabowo kala memberikan *taklimat* dalam Puncak Peringatan Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul Jakarta, Sabtu (15/2). Dalam pidato tanpa teks Prabowo mengajukan syarat: tak dicalonkan lagi, jika program tidak berhasil. "Kalau tidak berhasil bahkan mengecewakan, saya malu untuk maju lagi," ujar Presiden Prabowo. (KR, 16/2)

Gerindra gaspol. Partai berlambang Kepala Burung Garuda tampaknya tidak ingin terlambat dengan memanfaatkan hasil survei, kepuasan public terhadap 100 hari kepemimpinan Prabowo yang mencapai 80%. Realita ini agaknya menjadikan partai tersebut harus melakukan langkah antisipatif dan 'mengunci' nama Capres 2029. Dengan sudah ada Capres 2029, kekuatan politik Gerindra akan segera berkonsolidasi untuk persiapan pilpres mendatang. Kesiapan mesin politik Gerindra juga akan makin bagus. Kepala daerah dari Gerindra akan berusaha mengabdikan sekaligus memberikan layanan public dengan lebih baik. Semua ini akan menjadi pencitraan sekaligus 'jalan tol' Pencapresan Prabowo di 2029 mendatang.

Tentu ada yang menyebut pencapresan itu *kesusu*, terlalu dini. Apalagi, perjalanan memimpin negeri baru seumur jagung, bahkan baru selesai dilihat 100 hari kepemimpinannya yang sejatinya belum dapat dilihat hasilnya. Yang mengancam, dalam pertemuan di Hambalang Jumat (14/2), Prabowo menawarkan KIM Plus sebagai koalisi permanen hingga 2029.

Hal tersebut diungkap Ketum PKB, Iskandar Muhaimin. Menurut-

nya, Presiden Prabowo menawarkan koalisi permanen karena prastatu merupakan kunci utama pemerintahan. Dan PKB menurut Cak Imin menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dan percepatan pembangunan. Plh Presiden PKS Ahmad Heryawan memastikan partainya ikut dengan koalisi. iOh iya pasti. Koalisi *kan* terikat bersama sebagai koalisi. Ya tentu akan berkoalisi sampai akhir, katanya. (KR, 15/2)

Mengapa KIM Plus terkesan *sami'na wa atho'na*? Bahkan sepakat akan berada dalam koalisi permanen yang ditawarkan Ketum Partai Gerindra yang juga Presiden RI?

Bisa jadi hal ini akan menjadi waktu pimpinan atau pengurus partai untuk menyiapkan kader unggulan yang akan ditawarkan mendampingi Presiden Prabowo dalam Pilpres 2029 medatang? Meski *presidential threshold* sudah dinyatakan tidak berlaku karena inkonstitusional, namun dalam pilpres, partai politik tetap akan memiliki otoritas hampir tanpa batas dalam mengajukan calon. Menjadi pertanyaan, bagaimana nasib dan masa depan Wapres Gibran Rakabuming yang hingga saat ini tidak ditopang parpol?

Hanya di dalam sosiologi adalah teori:  $s = f(k)$ , sikap itu fungsi kepentingan. Sikap yang ditunjukkan sekarang tentu tidak lepas dari kepentingan saat ini. Para ketum tentu *sungkan* mengatakan tidak, karena sekarang masih mendukung dan mendapatkan posisi dalam koalisi ini. Orang partai pasti tahu dan berhitung, hal ini sejatinya dilemma. Semua ini harus dipikirkan terus, demi mendapat keuntungan electoral dalam pemilu.

Inilah politik. *Paribasan* Jawa mengenal dengan kalimat filosofis *esuk dhele sore tempe*. Dan jangan lupa, dunia perpolitikan Indonesia bukan hanya penuh dinamika tapi juga penuh anomali. Sehingga hal-hal di luar nalar, tanpa diduga dapat terjadi. Karena politik bukan hanya apa yang tampak di panggung depan. Tidak jarang, yang tersembunyi di belakangnya, justru memiliki kekuatan sangat menentukan. □-f

Implementasi Tourism 5.0



**TOURISM 5.0** merupakan salah satu dari lima program unggulan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun ini. Empat program yang lain

adalah gerakan wisata bersih, pariwisata naik kelas, pelaksanaan *event* dengan IP (*intellectual property*) Indonesia, dan program desa wisata. Program ini diharapkan dapat memberi dampak nyata, inklusif dan berkelanjutan di destinasi. Tidak hanya itu, program ini juga diproyeksikan mampu menargetkan 14,6 juta-16 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan mendorong mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) mencapai angka sekitar 1,08 miliar pergerakan.

Tourism 5.0 diharapkan menjadi salah satu daya ungkit untuk mewujudkan mimpi besar Kemenpar. Hal ini perlu mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk di dalamnya adalah masyarakat dan pengusaha industri pariwisata. Tourism 5.0 merupakan pariwisata yang tidak hanya berfokus pada *smart tourism*, tetapi juga pada pariwisata yang berkelanjutan dan humanis. Konsep ini tidak hanya menekankan pada pengalaman (*experience*) wisatawan, tetapi juga memberi nilai manfaat ekonomi, sosial-budaya bagi komunitas lokal dan pelestarian lingkungan.

Perkembangan teknologi *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), dan *internet of things* (IoT) menjadi perangkat yang mendukung wisatawan mendapatkan kenyamanan dan pengalaman yang mengesankan (*memorable experience*) di destinasi wisata. Teknologi ini tidak hanya untuk kenyamanan wisatawan, tetapi juga dapat digunakan untuk mewujudkan pelestarian lingkungan seperti untuk melacak emisi karbon. Dalam konteks ini, tourism 5.0 juga membuka ruang yang cukup besar bagi keterlibatan masyarakat dan membuat destinasi wisata yang inklusif sehingga dapat diakses oleh semua pihak termasuk wisatawan berkebutuhan khusus.

Fatkurrohman

Implementasi tourism 5.0 di destinasi mendesak untuk dilakukan oleh Kemenpar agar kenyamanan wisatawan, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dalam industri pariwisata dapat terwujud dengan baik. Tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut ada beragam tantangan yang harus diselesaikan, seperti infrastruktur teknologi, kolaborasi *stakeholder* dan edukasi masyarakat.

Pertama adalah infrastruktur teknologi. Pengembangan teknologi



KR-JOKO SANTOSO

blockchain, AI, dan IoT di destinasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal di sisi yang lain, nilai manfaat blockchain, AI dan IoT sangat penting untuk kegiatan kepariwisataan. Misalnya blockchain dapat digunakan untuk melacak dan menjamin transaksi secara transparan seperti penjualan tiket dan pengelolaan pendapatan destinasi. Sementara AI untuk memberi rekomendasi destinasi yang sesuai dengan keinginan wisatawan dan peta kepadatan kunjungan wisatawan di destinasi. Untuk AI, dapat digunakan memonitor kualitas udara atau polusi di destinasi. Untuk itu, sebagai langkah awal Kemenpar dapat menerapkan di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) terlebih dahulu sebagai *pilot project*.

Kedua adalah kolaborasi dengan *stakeholder*. Kemenpar perlu

melakukan kolaborasi dengan sektor swasta dan pelaku industri pariwisata. Hal ini perlu dilakukan karena implementasi tourism 5.0 di destinasi yang menekankan pada infrastruktur digital membutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini, Kemenpar dapat membangun jaringan dengan pengusaha *startup* lokal dan internasional. Tidak hanya itu, Kemenpar juga harus berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata lokal dan nasional agar berinvestasi di destinasi wisata.

Ketiga adalah edukasi masyarakat. Kemenpar perlu memberi edukasi ke masyarakat di destinasi tentang pentingnya penggunaan teknologi dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Tidak hanya itu, Kemenpar juga dapat memberikan *reward* ke masyarakat di destinasi yang dapat mengolah limbah yang dapat bernilai ekonomi atau inovasi energi terbarukan di destinasi.

Berpijak dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tourism 5.0 di destinasi wisata tidak hanya menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi, tetapi juga membuka ruang pariwisata yang inklusif dan menjaga keberlanjutan ekonomi, lingkungan serta sosial-budaya masyarakat. Tourism 5.0 diharapkan menjadi model baru pariwisata masa depan yang menitikberatkan pada kemanusiaan dan keberlanjutan. (\*)

\*) **Dr Fatkurrohman SIP MSI CHE**, Dosen Prodi Bisnis Perjalanan Wisata, Sekolah Vokasi, UGM, Alumnus Pondok Pesantren Al-Munawwir Kompleks L Krpyak Yogyakarta, dan Anggota ICMI Orwil DIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Peran Strategis Bank Syariah Wujudkan Ekosistem Halal



**BANK** syariah sering kali hanya dipahami sebagai lembaga keuangan yang mengganti bunga dengan prinsip bagi hasil atau akad syariah. Padahal,

bank syariah seharusnya berperan lebih dari sekadar lembaga komersial, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Contohnya, Grameen Bank di Bangladesh telah sukses menjadi bisnis sosial yang memberdayakan perempuan, dengan 96,8% nasabahnya adalah perempuan.

Para ulama dan ahli ekonomi Islam seperti Dr. Yusuf Qardawi, Monzer Kahf, dan Umer Chapra juga menekankan pentingnya peran sosial perbankan syariah melalui zakat, wakaf, dan pemberdayaan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah ekosistem dalam masyarakatnya yang memiliki gaya hidup halal (*halal life style*). Ekosistem semacam ini dikenal pula dengan ekosistem halal.

Bank syariah tidak hanya perlu mengembangkan produk dan layanan halal sebagai alternatif konvensional, tetapi juga harus menjadi katalisator perubahan menuju *halal lifestyle*. Bank syariah seharusnya tidak mendorong konsumsi berlebihan melalui pemasaran kredit yang agresif atau penawaran hadiah yang bisa menyebabkan misalokasi pendapatan. Ekosistem halal membutuhkan sinergi lima unsur: pelaku usaha halal, lembaga ekonomi sosial, pemerintah, infrastruktur halal, dan sumber daya insani (SDI). Infrastruktur halal mencakup kawasan industri halal (KIH), laboratorium halal, sistem penelusuran halal, serta standarisasi dan sertifikasi halal.

Dalam ekosistem halal, bank syariah memiliki empat peran strategis. Pertama, sebagai pusat keuangan bagi industri halal, bank syariah harus

Priyonggo Suseno

inovatif dalam menyediakan produk dan layanan sesuai kebutuhan industri halal, baik dalam bentuk skema pembiayaan maupun investasi. Faktanya, menurut data OJK, pembiayaan perbankan syariah tahun 2024 hanya 8,06% dari total kredit nasional, dengan 48%-nya dialokasikan ke sektor produktif, jauh di bawah rata-rata kredit produktif secara nasional (73%). Karena itu, bank syariah perlu meningkatkan strategi pembiayaan produktif agar sektor halal bisa tumbuh seperti sektor makanan, fesyen, farmasi dan kosmetik, pariwisata, dan industri kreatif halal.

Kedua, peningkatan kualitas SDI tidak hanya tanggung jawab dunia pendidikan. Bank syariah harus berkontribusi dalam edukasi dan literasi ekonomi syariah dengan mengintegrasikan lembaga pendidikan dan pelatihan. Program "Praktisi Mengajar" serta magang mahasiswa perlu diperluas dan diperkuat. Selain itu, edukasi ekonomi halal ke pondok pesantren dan sekolah menengah juga penting agar pemahaman ekonomi syariah tertanam sejak dini.

Ketiga, pengembangan infrastruktur ekosistem halal membutuhkan sinergi banyak pihak, termasuk bank syariah. Pembangunan KIH, pusat kuliner halal, destinasi wisata ramah Muslim, dan UMKM halal membutuhkan keterlibatan bank syariah sebagai penyedia modal, perguruan tinggi sebagai inkubator bisnis, serta pemerintah daerah sebagai penyedia lokasi. Saat ini, baru ada tiga KIH yang diresmikan, yaitu di Serang Jawa Barat, Sidoarjo Jawa Timur, dan Bintan. KNEKS juga telah mengembangkan Zona

Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) sejak 2022 di beberapa lokasi, dan ke depan diharapkan KIH hadir di lebih banyak wilayah, termasuk Yogyakarta.

Keempat, sektor sosial syariah seperti zakat, sedekah, dan wakaf berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan dan miskin. Bank syariah dapat berkolaborasi dengan lembaga amal zakat (LAZ) dan nadzhir wakaf dalam pemberdayaan masyarakat, baik sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) maupun lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Dalam hal ini, bank syariah diharapkan menjadi mediator dan inkubator bagi kelompok rentan.

Dengan peran strategis tersebut, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai entitas keuangan, tetapi juga sebagai lokomotif dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. □-d

\*) **Priyonggo Suseno**, dosen Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia; Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) wilayah DIY; pengawas syariah pada beberapa entitas bisnis syariah.

Pojok KR

Prabowo minta tak dicalonkan pada 2029, kalau program tidak berhasil

-- Ini namanya tahu diri \*\*\*

Kampus harus jadi oposisi objektif -- Jangan takut bersuara kritis \*\*\*

ASN di Karanganyar dilarang pakai gas melon

-- Duh... golongannya padahal berbeda-beda

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuruya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSo.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoek Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSo., Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSo., H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankryk23@yahoo.com](mailto:iklankryk23@yahoo.com), [iklankryk13@gmail.com](mailto:iklankryk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). Alamat e-mail: [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.